

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut (Soemohadiwidjojo, 2018:10) UMKM adalah suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan modal yang terbatas. Namun demikian, UMKM telah diakui menjadi salah satu tulang punggung penyedia lapangan kerja, serta merupakan dinamisator dan stabilisator perekonomian Negara. UMKM juga menjadi penopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan jasa pendukung lainnya. UMKM juga bersifat lincah sehingga umumnya mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan.

Menurut (Soemohadiwidjojo, 2018:10) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, bisnis Usaha Mikro-Kecil-Menengah di Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki asset maksimal sebesar Rp 50.000.000 dengan omset tahunan maksimal 300.000.000;
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dengan asset antara Rp 50.000.000 sampai 500.000.000 (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta memiliki omset tahunan antara 300.000.000 sampai 2.500.000.000;

- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dengan aset antara Rp 500.000.000 sampai 10.000.000.000 (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan omset tahunan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000

Menurut (Soemohadiwidjojo, 2018:11), Sementara *World Bank* membedakan UMKM berdasarkan jumlah karyawan, asset, dan omset tahunan sebagai berikut:

- a. *Micro Enterprise*, yaitu usaha dengan jumlah karyawan maksimal 10 orang, pendapatan setahun tidak lebih dari *USD* 100 ribu;
- b. *Small Enterprise*, yaitu usaha dengan jumlah karyawan maksimal 30 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi *USD* 3 Juta, dan memiliki asset tidak melebihi *USD* 3 Juta;
- c. *Medium Enterprise*, yaitu usaha dengan karyawan maksimal berjumlah 300 orang, pendapatan setahun tidak Melebihi *USD* 15 Juta, serta memiliki aset tidak melebihi *USD* 15 juta.

UMKM dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha berikut:

- a. Bidang perdagangan: UMKM retail, UMKM Grosir;
- b. Bidang manufaktur: UMKM pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, UMKM pengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi , UMKM pengelola bahan setengah jadi menjadi barang jadi;

- c. Bidang jasa: UMKM pendidikan, UMKM biro perjalanan, UMKM penitipan anak, UMKM pencucian kendaraan, UMKM catering, UMKM desain grafis, UMKM *event organizer*;
- d. Bidang agrarian: UMKM perkebunan, UMKM pertanian, UMKM perikanan;
- e. Bidang esktratif: UMKM penebangan kayu, UMKM pertambangan.

## **2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP)**

### **2.2.1 Pemahaman SAK ETAP**

Menurut (Supami Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari, Defia Nurbatin, 2017:43) ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal perusahaan. Beberapa contoh pengguna laporan keuangan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar atau regulator lain yang bertujuan untuk penerbitan efek di pasar modal;
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fiduasi untuk sekelompok besar masyarakat, diantaranya seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Menurut (Mujairimi, 2017:7) SAK ETAP dirancang dan dibuat untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Bagi perusahaan yang tidak *go public* atau yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, disarankan untuk mengacu pada SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, SAK ETAP muncul sebagai solusi bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Dalam kata pengantar di SAK ETAP oleh dewan pengurus nasional IAI menyatakan bahwa SAK ETAP, bukan SAK UKM (Usaha Kecil & Menengah), bertujuan menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada PSAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UKM, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Berdasarkan SAK ETAP paragraph 12 menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi:

- a. Neraca;
- b. Laporan laba rugi;
- c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  1. Seluruh perubahan dalam ekuitas;
  2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- d. Laporan arus kas;

- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Berbeda halnya dengan PSAK umum, informasi dalam laba rugi di SAK ETAP hanya sampai pada laba atau rugi bersih entitas pada akhir periode, tidak terdapat tambahan laba komprehensif lainnya (OCI) kecuali ada kebijakan sebagai alternatif akuntansinya untuk memunculkan OCI sesuai dengan kondisi pada PSAK umum. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini telah diperkenankan.

SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik yang signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan oleh sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu pada SAK ETAP.

### **2.2.2 Ruang Lingkup SAK ETAP**

Di Indonesia, terdapat 4 pilar standar akuntansi. Pilar di sini adalah standar akuntansi yang berdiri sendiri, memiliki kerangka dasar konseptual spesifik dan memiliki persyaratan standar akuntansi. Empat pilar standar akuntansi tersebut, yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum);
2. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah);
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAK ETAP dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP agar usaha kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut dapat diaudit dan memperoleh opini audit. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mempermudah akses ke sumber dana untuk memperoleh pendanaan, misalnya untuk memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha.

### **2.2.3 Karakteristik Kualitatif Dan Prinsip Pervasif Dalam SAK ETAP**

Menurut (Supami Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari, 2017:46) Tujuan laporan keuangan yang tertuang dalam konsep dan prinsip SAK ETAP yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan

keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang tertuang dalam SAK ETAP adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar.

2. Relevan

Informasi harus relevan adalah jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3. Materialitas

Suatu informasi dipandang material jika tidak dicantumkan kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Informasi dikatakan andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

#### 5. Substansi Mengungguli Bentuk

Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

#### 6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan yang tidak mengizinkan bias. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan *liabilitas* atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi.

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap.

#### 8. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi *tren* atau kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta dapat dibandingkan antar entitas untuk mengetahui posisi, kinerja serta perubahan posisi keuangannya secara relatif. Oleh karena itu, konsistensi penerapan perlakuan akuntansi antar periode dan antar entitas menjadi penting.

#### 9. Tepat Waktu.

Artinya bahwa informasi laporan keuangan harus disediakan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Entitas mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Hal ini dapat terjadi misalnya jika entitas terlalu menggunkan keandalan, maka ketepatan waktu penyajian informasi laporan keuangan menjadi berkurang dan mengurangi relevansinya dalam mempengaruhi keputusan pengguna. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangannya adalah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, entitas harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya untuk menyediakan informasi tersebut.

Prinsip pervasif artinya prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran *aset*, *liabilitas*, pendapatan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan (KDPPLK). Prinsip ini diperlukan dalam membuat pertimbangan terhadap perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak secara spesifik diatur dalam SAK ETAP. Dalam kondisi demikian, maka entitas harus menggunakan pertimbangan yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam

membuat pertimbangan tersebut, entitas harus mengacu dan mempertimbangkan penerapan dari sumber-sumber berdasarkan hierarki sebagai berikut:

- a. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait
- b. Defenisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk *aset*, *liabilitas*, pendapatan serta beban dan prinsip pervasif.

Prinsip pengakuan dan pengukuran umum yang diatur dalam konsep dan prinsip pervasif SAK ETAP adalah seperti yang diuraikan berikut. Suatu pos diakui sebagai *aset*, *liabilitas*, pendapatan dan beban jika memenuhi kriteria berikut:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal. Pengukuran adalah proses penempatan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur *aset*, *liabilitas*, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk memilih dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya nilai historis dan nilai wajar.

#### **2.2.4 Perlakuan Akuntansi Menurut SAK ETAP**

Pengaturan dalam SAK ETAP akan diuraikan masing-masing berdasarkan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Laporan entitas meliputi, yaitu:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan);
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4. Laporan Arus Kas;

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan yang lain.

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan “Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba” sebagai pengganti “Laporan Laba Rugi” dan “Laporan Perubahan Ekuitas”.

Sebagai ilustrasi bentuk laporan laba rugi dan alternatifnya, maka berikut ini disajikan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas PT.IWAKA:

**Tabel 2.1** Laporan Laba Rugi

<b>PT. Iwaka</b> <b>Laporan Laba Rugi</b> <b>Untuk Tahun yang berakhir Desember 2015</b> <b>(dalam ribuan rupiah)</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Komisi	56.100	
Pendapatan Sewa	6.500	
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>62.600</b>
Dikurangi: BEBAN		
Beban gaji	(45.700)	
Beban Utilitas	(19.100)	
Beban penyusutan	(4.000)	
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(68.800)</b>
<b>Laba(rugi) Bersih</b>		<b>(6.200)</b>

**Tabel 2.2** Laporan Perubahan Ekuitas

<b>PT. Iwaka</b> Laporan Perubahan Ekuitas <b>Untuk Tahun yang berakhir Desember 2015</b> (dalam ribuan rupiah)			
	Modal Saham	Saldo Laba	Total Ekuitas
<b>Saldo Awal 1 Januari 2015</b>	16.200	30.000	46.200
Rugi Bersih		(6.200)	(6.200)
Dividen		(4.000)	(4.000)
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2015</b>	<b>16.200</b>	<b>19.800</b>	<b>36.000</b>

Menurut (Supami Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari, 2017:51-52), ringkasan perbedaan utama antara SAK Umum dan SAK ETAP secara umum dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.3** Perbedaan SAK ETAP dengan SAK Umum (IFRS)

NO	KETERANGAN	SAK ETAP	SAK Umum (IFRS)
1	Laporan Keuangan	a. Neraca b. Laporan Laba Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan	a. Laporan posisi keuangan b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan
2	Laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas	Dapat digantikan dengan laporan laba rugi dan saldo laba pada kondisi tertentu	Tidak ada alternative lain untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas
3	Metode penyusunan arus kas dari kegiatan operasi	Metode tidak langsung	Metode langsung dan metode tidak langsung

Lanjutan tabel 2.3

	Untuk dijual		
5	Investasi pada asosiasi	Diukur menggunakan metode biaya	Diukur menggunakan metode ekuitas
6	Investasi Pada entitas anak	Diukur menggunakan metode ekuitas, tidak dikonsolidasi	Konsolidasi
7	Aset tetap	Suatu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah	Alternatif metode pengukuran: a. Metode biaya perolehan b. Metode nilai wajar
8	Property investasi	Suatu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan	Alternatif metode pengukuran: a. Metode biaya perolehan b. Metode nilai wajar
9	Aset tak berwujud	Suatu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan	Alternatif metode pengukuran: a. Metode biaya perolehan b. Metode reavluasi
10	Kriteria pengakuan sewa pembiayaan	Salah satu dari: a. Sewa mengaihkan kepemilikan aset kepada <i>lessee</i> di akhir masa sewa b. <i>Lessee</i> memiliki opsi beli pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajarnya	Kriteria bersifat <i>principle base</i> , jika telah terjadi transfer dan benefit dari <i>lessor</i> dan <i>lessee</i>
11	Kapitalisasi biaya pinjaman	Tidak diperkenankan, semua dibebankan sebagai beban bunga	Diperkenankan
12	Pajak penghasilan	Tidak mengakui pada tanggungan	Mengakui pajak tanggungan

### 2.3 Sosialisasi SAK ETAP

Menurut (Endang Masitoh W, 2015) Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperilakukannya agar dapat

berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu dimasyarakat. Menurut (Novia Nurdwijayanti, 2018) Kurangnya sosialisasi penerapan SAK ETAP dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Koperasi dan UMKM sehingga pelaku usaha tidak mengetahui tentang standar yang harus mereka jadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, atau pelaku usaha yang sudah mengetahui tetap tidak melaksanakan karena dirasa merepotkan apabila harus menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

Menurut (Andi Agung, Belianus Patria Latuheru, 2018) Kegiatan sosialisasi terkait pembukuan bagi UMKM memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi dan pelatihan sebagai wujud pengembangan UMKM baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi swasta. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran pengusaha UMKM untuk lebih aware dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pembukuan bagi perkembangan usaha mereka. Menurut (Andi Agung, Belianus Patria Latuheru, 2018) Sosialisasi SAK ETAP dimaksudkan sebagai suatu mekanisme penyampaian informasi mengenai SAK ETAP kepada pelaku UMKM sebagai target penggunaannya melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk membuat pelaku UMKM menjadi tahu bahkan memahami SAK ETAP. Sebagai kelanjutannya, diharapkan informasi mengenai standar ini mendorong implementasi SAK ETAP pada UMKM ke depannya dalam membantu

pengembangan keterampilan manajemen keuangan UMKM serta mendukung pengambilan keputusan bagi UMKM.

Pada dasarnya kegiatan sosialisasi ialah bagian dari proses komunikasi informasi SAK ETAP dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baku menurut standar yang berlaku serta peningkatan pengetahuan UMKM mengenai SAK ETAP. Agar penyampaian informasi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, diperlukan pemahaman mengenai konsep informasi itu sendiri. Sosialisasi SAK ETAP sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan manajemen dan pengelolaan keuangan yang penting dalam rangka mendukung penerapan praktik akuntansi yang baku dengan cara memberikan pengetahuan mengenai SAK ETAP bagi pengusaha UMKM. Sosialisasi yang dijalankan jelas sangat berpengaruh pada pemahaman dan kemauan pelaku UMKM dalam menerapkan SAK ETAP. Dalam proses sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai SAK ETAP memang diperlukan adanya kontinuitas dan konsistensi untuk mensosialisasikan SAK ETAP ke seluruh pihak terkait secara menyeluruh di seluruh Indonesia, baik dilakukan oleh IAI yang telah membuat standar tersebut maupun secara kerjasama dengan institusi lainnya. Dengan adanya input informasi yang berkesinambungan dari berbagai pihak yang diterima oleh pelaku UMKM, akan timbul motivasi dan keinginan untuk menerapkan SAK ETAP tersebut dengan segera secara tepat dan akurat.

#### **2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut (Maria Junefirstina, 2017) teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*) database, jaringan (*internet, intranet*),

*electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pada penelitian (Novia Nurdwijayanti, 2018) Teknologi adalah berbagai hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi.

Menurut (Ni Wayan Zenny Puspa Wandini, 2017) Teknologi informasi salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan sistem manual. Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan agar dapat merealisasikan sebuah system. Teknologi informasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja individual, maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan dengan tugas yang didukung. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan yang tepat dari teknologi informasi (TI) akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, selanjutnya akan meningkatkan kinerja individu

Menurut (Andi Agung, Belianus Patria Latuheru, 2018) Pemahaman pentingnya teknologi informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan mereka terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatan penyediaan

informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah, maka peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi informasi terutama pada para petinggi di dalam suatu perusahaan menjadi persyaratan inti dalam mencapai efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha. Dengan adanya pemahaman teknologi informasi dalam hal ini teknologi informasi akuntansi diharapkan mampu mengenal lebih jauh lagi tentang pentingnya penerapan SAK ETAP tersebut. Karena UMKM di era sekarang sudah semakin banyak, tentu saja persaingan di dunia bisnis semakin kuat. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan penerapan SAK ETAP harus diterapkan untuk menghadapi persaingan tersebut.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Kesimpulan
1	(Endang Masitoh W, 2015)	<b>Independen:</b> Sosialisasi, Tingkat Pemahaman, Motivasi dan Kepribadian  <b>Dependen:</b> Penerapan SAK ETAP	Secara parsial faktor sosialisasi, motivasi dan kepribadian berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAK ETAP, sedangkan faktor tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP.
2	(Ni Wayan Zenny Puspa Wandini, 2017)	<b>Independen:</b> Tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi <b>Dependen:</b> Penerapan SAK ETAP	Tingkat pendidikan manajer, pengalaman manajer dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif pada penerapan SAK ETAP di koperasi simpan pinjam Kota Denpasar.

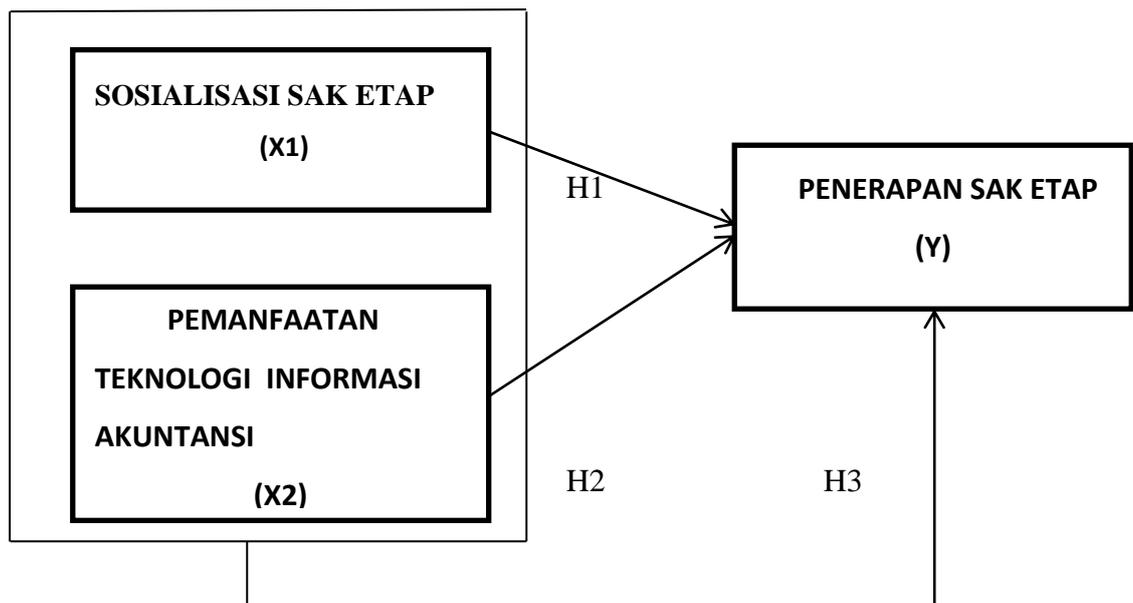
## Lanjutan

3	(Ni Ayu Putu Uma Dewi, Gede Adi Yuniarta, 2017)	<p><b>Independen:</b> Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat Pendidikan Pemilik, Persepsi Pelaku UKM</p> <p><b>Dependen:</b> Penggunaan SAK ETAP</p>	Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat pendidikan pemilik, Persepsi pelaku UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan/penerapan SAK ETAP
4	(Novia Nurdwijayanti, 2018)	<p><b>Independen:</b> Sosialisasi SAK ETAP, Penjualan, Latar belakang Pendidikan Pemilik, Usia Perusahaan, Teknologi Informasi</p> <p><b>Dependen:</b> Implementasi SAK ETAP</p>	Sosialisasi SAK ETAP dan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM, sedangkan Omzet penjualan, tingkat pendidikan pemilik, umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM.
5	(Maria Junefirstina, 2017)	<p><b>Independen:</b> Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi</p> <p><b>Dependen:</b> Implementasi SAK ETAP</p>	Kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi dan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.
6	(Andi Agung, Belianus Patria Latuheru, 2018)	<p><b>Independen:</b> Pendidikan Pemilik, Pemahaman Teknologi Informasi, Karakteristik laporan keuangan, Sosialisasi dan Pelatihan.</p> <p><b>Dependen:</b> Implementasi SAK ETAP</p>	Pendidikan pemilik, sosialisasi dan pelatihan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP, sedangkan pemahaman teknologi informasi dan karakteristik laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP.
7	(Mulyaga, 2016)	<p><b>Independen:</b> Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat Pendidikan Pemilik, skala usaha, umur usaha, budaya organisasi.</p> <p><b>Dependen:</b> Implementasi SAK ETAP</p>	Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, dan budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap implementasi SAK ETAP. Sedangkan umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP.

8	(Siti Nurlaela, Solichul Hadi, Pramono Hadi, 2018)	<b>Independen</b> Berbasis teknologi, Sistem Keuangan, Prototipe <b>Dependen</b> <b>Implementasi SAK ETAP</b>	Teknologi Berpengaruh Terhadap Implementasi SAK ETAP. Hal ini dikarenakan Teknologi sangat dibutuhkan dalam merancang system yang cocok untuk UMKM dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.
9	(Yanto, Yulianto, Sebayang, & Mulyaga, 2017)	<b>Independen</b> Budaya organisasi; UKM Indonesia, Pendidikan, Sosialisasi <b>Dependen</b> Implementasi SAK ETAP	Sosialisasi SAK ETAP berpengaruh terhadap Implementasi SAK ETAP dengan meningkatkan budaya organisasi, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan kepatuhan terhadap SAK ETAP.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori diatas peneliti dapat merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.7 Hipotesis

Dari uraian diatas secara simultan dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Sosialisasi SAK ETAP berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

H3: Sosialisasi SAK ETAP dan Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2014:168) Desain penelitian adalah suatu rancangan lengkap dan terinci tentang pelaksanaan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data, pembuatan kesimpulan penelitian, penulisan laporan yang lengkap dan final, serta sosialisasi atau penyajian hasil penelitian. Dalam desain penelitian memuat tentang informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti, sumber khusus darimana informasi diperoleh, strategi untuk mengumpulkan dan menganalisisnya.

Penelitian ini menggunakan metode survei. Dalam penelitian survei, data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Yang dijadikan unit analisis adalah satuan tertentu atau individu yang menjadi responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, penjelasan diperkuat dengan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik dan gambar, dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan.